

**MANUSIA FUNDAMENTAL PANCASILA DRIYARKARA DAN TANTANGAN  
MEMBANGUN DEMOKRASI DI INDONESIA****Agus Sutono**

Universitas PGRI Semarang

[agussutono@upgris.ac.id](mailto:agussutono@upgris.ac.id) \*)<sup>1</sup>**Abstrak**

*Manusia dalam pandangan Driyarkara merupakan konsep manusia yang berlandaskan pada pandangan dasar mengenai Pancasila. Driyarkara menyebut pandangan tentang manusia Pancasila sebagai pandangan manusia yang fundamental. Driyarkara membedakan pandangan manusia yang bersifat fisis dan psikologi untuk kemudian sampai kepada pandangan manusia yang fundamental. Pandangan manusia yang fundamental adalah pandangan tentang manusia yang mencantumkan corak-corak manusia yang esensial. Gambaran yang demikian oleh Driyarkara disebut dengan image of man atau idea of man. Padahal, untuk mengaplikasikan manusia secara fundamental harus melalui pola hubungan antar person yang disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kerjasama. Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan negara kita untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah mencoba menganalisa tantangan demokrasi dengan menggunakan konsep manusia fundamental Driyakarta. Artikel ini mencoba memberikan tawaran alternatif bagaimana seharusnya mengatasi berbagai persoalan demokrasi dengan corak penelitian kualitatif dan beberapa unsur metodis; Pertama, analisis digunakan untuk melihat tantangan demokrasi bagi pancasila secara kritis. Kedua, hermeneutika sebagai metode untuk menafsirkan berbagai makna di balik permasalahan demokrasi, sosial, politik, dan hak asasi manusia yang dihadapi di Indonesia sebagai core value Pancasila. Kedua unsur metodis tersebut kemudian digunakan penulis untuk menjawab kebutuhan esensial terkait penguatan Pancasila dan penerapan Pancasila di Indonesia.*

**Kata kunci:** *Manusia Fundamental; Pancasila; demokrasi.*

**Abstract**

*Man in Driyarkara's view is a human concept based on the basic view of Pancasila called a man a fundamental human view. Driyarkara distinguishes the physical and psychological views of the human being and then comes to the fundamental human view. A fundamental human view is a view of man that lists essential human patterns called the image of a man or the idea of a man. to apply human beings fundamentally, it must go through a pattern of relationships between people that is adjusted to the principles of justice and cooperation. This is very needed for our country to build a better democracy. The purpose of this study is to try to analyze the challenges of democracy using the fundamental human concept of Driyakarta. This article tries to offer an alternative to how to address various democratic issues with qualitative research patterns and some methodical elements; First, the analysis is used to critically look at the challenges of democracy. Second, hermeneutics is a method to interpret the various meanings behind the democratic, social, political, and human rights problems faced in Indonesia as the core values of Pancasila. The two methodical elements are then used by the author to answer the essential needs related to strengthening democracy and the application of Pancasila in Indonesia.*

**Keywords:** *Fundamental human beings; Pancasila; democracy.*

---

<sup>1</sup> Alamat email yang dituliskan di sini adalah alamat email corresponding author

## PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Indonesia memiliki cita-cita demokrasi yang tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi, yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan sila keempat yaitu kerakyatan dan sila ke lima yaitu keadilan dalam Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan oleh Soekarno menyebutnya dengan rangkaian dari prinsip “sosio demokrasi”. Istilah sosio demokrasi berasal dari seorang teoretikus Marxis Austria, Fritz Adler yang mendefinisikan “sosio demokrasi” sebagai “*politiek economische democratie*” Soekarno sering mengutip ungkapan Adler “demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi.

Cita cita keadilan dan kemakmuran menjadi tujuan akhir dari revolusi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan jalan demokrasi politik dan juga dengan demokrasi ekonomi yang berorientasikan untuk kebijakan sosial kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat yang adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya, ungkapan tersebut terwujud dalam pribahasa “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*”. Istilah tersebut tersirat bahwa masyarakat memiliki impian yang adil dan makmur yang merupakan cita-cita murni dengan penuh pengorbanan dan perjuangan sekian lamanya. Masyarakat adil dan makmur merupakan suatu harapan panjang atas pengalaman yang sudah dirasakan masyarakat selama berpuluh-puluh tahun akibat penjajahan (Soekarno, 1959/2002: 213-214).

Kemudian, dengan kehadiran negara modern, pemilu sebagai syarat dari demokrasi dalam berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Prosedur pemilu secara umum memilih wakil-wakil rakyat di parlemen maupun legislative pemerintahan (Patta 2009). Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah suara mayoritas didominasi oleh kekuasaan yang tidak adil, sehingga jalan demokrasi yang seharusnya justru tidak tercapai. Hal ini yang seolah-olah menekan konsep demokrasi untuk membangun tirani mayoritas yang mewajibkan hadirnya parlemen, partai politik di dalam proses pemilu. Respon tersebut yang menimbulkan keprihatinan oleh rakyat terhadap kualitas wakil-wakil rakyat yang ditentukan berdasarkan kepentingan partai politik (Saleh 2008). Padahal, rakyat sangat membutuhkan wadah untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, perlunya melihat kembali norma yang terkandung dalam pancasila sebagai proses menuju pemerintahan yang demokratis.

Pancasila sebagai sumber dari segala kegiatan masyarakat terutama dalam permasalahan negara. Tentunya, tatanan praktik kenegaraan berkonsekuensi membentuk rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Wajah demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana pancasila diterapkan sebagai norma fundamental negara (Tauda 2019). Fundamental yang artinya pancasila mampu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan juga menjadi kenyataan objektif di dalam aktivitas bangsa. Maka, pancasila memiliki fungsi yang sangat fundamental bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

Bagi Driyarkara, Melalui pola hubungan antar person inilah prinsip keadilan dan kerjasama dibangun. Artinya, perlunya komitmen pola kerja antar budaya insitusi. Institusi yang memungkinkan semua orang mendapatkan apa yang dibutuhkan, penghargaan atas sesama, dan juga untuk tujuan yang lebih besar bagi manusia itu sendiri. Atas dorongan pola hubungan antar person yang demikian ini pula maka setiap individu tergerak dan sadar untuk saling menciptakan kemakmuran bersama sedapat-dapatnya dalam wujud kerja sama. Pola hubungan yang saling memperkembangkan di antara person-person ini pula pemaknaan manusia fundamental juga terproyeksi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Driyarakara menyebut sebagai kehidupan sosial yang bermuara pada demokrasi. Driyarkara secara khusus juga menyebut demokrasi yang tercermin dalam demokrasi Pancasila adalah demokrasi keluargaan

Penelitian kualitatif ini mencoba menjabarkan lebih jauh tentang konsep manusia Pancasila fundamental Driyarkara sebagai upaya untuk memberikan kesadaran demokrasi di

Indonesia. Harapnya, dengan konsep tersebut akan membentuk manusia demokratis yang melihat dirinya bersama dengan sesamanya dalam kesatuan.

## PEMBAHASAN/DISCUSSION

### Biografi Driyarkara

Manusia adalah kawan bagi sesama, ungkapan tersebut adalah ajaran pokok Driyarkara seorang Pendidikan dan juga pemikir yang lahir di Kedunggubah, Kaligesing, Purworejo pada tahun 13 Juni 1913. Pegiat permasalahan aktual kemanusiaan di Indonesia ini memperkenalkan banyak ide-idenya tentang Pendidikan, social, dan filsafat ke masyarakat. Driyarkara meninggal pada 11 Februari 1967 di Giri Sonta Ungaran Jawa Tengah (Asa 2019). Beberapa konsep yang beliau kemukakan adalah sebagai berikut;

### Manusia Fundamental

Manusia dalam pandangan Driyarkara merupakan konsep manusia yang berlandaskan pada pandangan dasar mengenai Pancasila. Driyarkara menyebut pandangan tentang manusia Pancasila sebagai pandangan manusia yang fundamental. Driyarkara membedakan pandangan manusia yang bersifat fisis dan psikologi untuk kemudian sampai kepada pandangan manusia yang fundamental. Pandangan manusia yang fundamental merupakan pandangan tentang manusia yang mencantumkan corak-corak manusia esensial. Gambaran yang demikian oleh Driyarkara disebut dengan *image of man* atau *idea of man* (Driyarkara, 2006: 939).

“Pandangan manusia fundamental yang disebut sebagai *idea of man* berlandaskan Pancasila merupakan kesatuan dengan dunia material, tetapi juga dengan manusia sesama; dan akhirnya manusia Pancasila itu berhubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Maka, manusia itu adalah relasi atau berelasi vertikal ke Tuhan dan horisontal ke sesama manusia serta dunia. Gambaran relasi ini berjalan secara dinamis karena manusia terus bergerak aktif membangun dirinya dan masyarakatnya. Manusia sebagai makhluk yang mengafirmasi bahwa ia mampu melihat dirinya sendiri dan manusia sesama serta akhirnya kesatuan yang lebih sempurna dengan Tuhan (Driyarkara, 2006: 939)”.

Pada dasarnya, Driyarkara (2006) membangun konsep manusia Pancasila dengan bertolak dari fakta yang dihadapi sebagai manusia yang riil. Artinya, Driyarkara melihat fakta sosial keberadaan manusia sebagai cara untuk membangun konsep utuh tentang manusia itu sendiri. Driyarkara mensyaratkan bahwa manusia merupakan problem bagi dirinya sendiri untuk menjelaskan bahwa manusia adalah sesuatu yang selalu mengandung sebuah misteri. Manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek penyelidikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dirinya tersebut (Driyarkara, 2012:104).

Manusia dalam sejarah pengetahuan dan pencaian makna tentang dirinya diberikan pengertian yang beragam, salah satunya sebagai *animale rationale*, *geist-in-welt* atau *esprit incame* (Driyarkara, 202:104). Manusia pada akhirnya tidak akan selesai diberikan pengertian yang tidak cukup dalam satu rumusan kalimat saja. Artinya, pengertian yang sudah didefinisikan tidak mampu menjelaskan secara komprehensif tentang manusia. Satu pengertian yang diberikan selalu mengandung celah untuk dikritisi komprehensifitasnya. Dengan demikian, dalam menjelaskan siapa manusia, selalu ada celah kekurangan. Sebagai contoh, konsep *animale rationale* merujuk pada pemahaman bahwa manusia memiliki aspek keberbuidan/nalar dalam dirinya. Namun, pemahaman tersebut tidaklah mencukupi untuk menjawab tentang manusia sebagai sebuah totalitas. Meskipun, dapat dipahami bahwa tambahan mengenai kemampuan budi atau nalar manusia merupakan pembeda diri manusia dengan makhluk lainnya, dan sebagai sebuah kodrat. Namun, sekali lagi tidak mencukupi untuk menjadi kalimat penjelas tentang siapa manusia.

Selanjutnya, konsep *geist-in-welt* juga tidak menunjuk tempat “manusia” sebagaimana pemahaman mengenai ruang. Namun, hanya mengartikan manusia berada dalam dunia, secara *badaniyyah*. Sebab, *In-welt* memiliki arti di dunia, dan manusia di dunia secara dalam wujud *badaniyyah* juga. Artinya, manusia melekat bersama dalam kesatuan dengan benda-benda lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, manusia secara *badaniyyah* menyebabkan keberadaannya

di alam dunia ini. Pemahaman seperti ini juga belum mampu memberikan kepuasan terhadap apa yang disebut sebagai manusia sesungguhnya.

Secara prinsip, tidak hanya secara *badaniyyah* atau *lahiriyyah* saja, namun manusia memiliki dimensi non material. Dengan demikian, manusia bukan hanya yang jasmani sehingga manusia ada proses ketertaklukkannya pada hukum-hukum biologis. Akan tetapi, terdapat aspek non material yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kesadaran untuk mengetahui tentang dirinya, menguasai dan mengatur dirinya, serta dapat memastikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi Driyarkara manusia memiliki dua dasar kesempurnaan, yaitu cipta dan karsa atau budi dan kemauan (Driyarkara, 20: 107). Manusia bukan hanya ada, melainkan juga mengerti adanya “manusia mengerti dirinya sendiri”. Artinya, manusia memiliki dirinya sendiri yang seolah dirinya sendiri itu ada di tangannya. Manusia dalam perbutannya, dirinyalah yang menggerakkan dirinya sendiri, dan dia sendirilah yang menentukan dirinya sendiri menjadi subjek yang berbuat sesuatu. Sartre mengatakan bahwa kebebasan manusia dalam berbuat itu adalah kebebasan yang absolut (Fuad Noorzeha, Dita Kafaabillah 2022). Sehingga, manusia dapat mengerti, mengalami, dan merasa. Hal ini yang menyadarkan manusia bahwa dirinyalah yang berbuat yaitu sebagai pelaku dari aktifitas yang dilakukan. Hal inilah yang kemudian membuat manusia memiliki pengalaman paling mendasar, yaitu *Aku ini Ada* dan *Aku ini Aku* (Driyarkara, 2006: 107).

Manusia fundamental adalah manusia yang sadar untuk menyelami dirinya dan memasuki dirinya. Artinya, manusia bukan hanya yang *jasmaniyyah* semata yang sangat tidak mungkin memasuki dirinya sendiri. Akan tetapi, manusia bukanlah barang, manusia bukan materi, bukan apa, tetapi manusia adalah pertanyaan tentang siapa. Dengan demikian, secara komprehensif manusia adalah apa-siapa dan siapa (Driyarkara, 2006:107). Manusia adalah apa sekaligus siapa. Manusia berupa “apa untuk berupa siapa”. Manusia sebagai apa tidak bisa dimengerti kecuali jika dipandang sebagai siapa.

Manusia merupakan gabungan dari keduanya, namun sebagai suatu kesatuan “dwitunggal”. Manusia benar-benar tunggal, bukan dua barang atau sesuatu yang diferensiasikan. Selanjutnya, timbul pertanyaan dasar bagaimana hubungannya dengan jiwa dan badan jika begitu? Benar jika apabila dikatakan bahwa jiwa itu ada dalam badan, namun tidak dapat dikatakan secara tersurat. Kata di dalam dengan demikian digunakan untuk menunjuk pengertian yang lebih tinggi, yang tidak dapat dipersepsikan sama secara material. Kata “di dalam” menunjuk intuisi manusia yang sebenarnya, menunjuk manusia sebagai :Aku. Dalam kesadaran-Aku, manusia tidak membedakan luar atau dalam, kiri atau kanan. Namun, pada saat yang sama, manusia hanya sadar tentang dirinya sebagai satu kesatuan. Kata “di dalam” hanya untuk menunjukkan atau tepatnya mengatakan bahwa dalam dan dengan pengalaman dirinya sendiri atas dirinya sebagai jasmani, kemudian manusia mengalami dirinya sendiri sebagai rohani.

Hal ini mengartikan bahwa, manusia merupakan kesatuan, tetapi juga merupakan susunan (composition). Dalam kaitan hal ini, Driyarkara menggunakan metafora yang sangat khas dalam melihat kesatuan antara jiwa dan badan melalui istilah atau perumpamaan sebuah kalimat ungkapan “*randu alas (badan) merambat witing kesimbukan (jiwa)*”. Secara tekstual kalimat tersebut sebetulnya tidaklah logis, namun perlu dibaca dalam konteksualisasinya. Secara tekstual dan terkesan aneh sebab menggunakan perumpamaan hal yang sepertinya tidak mungkin. Disebut aneh sebab Randu Alas (pohon yang besar) merambat pada tumbuhan yang kecil yang sebenarnya hanya bisa merambat. Oleh demikian, ungkapan yang kelihatannya berlawanan (paradoks) itu adalah bahwa yang terlihat kasar dan besar (Randu Alas, Badan) itu tergantung dari yang halus, yang tidak kasar, yang tidak material.

Kemudian, dalam pendekatan yang lebih maknawi maka pandangan tersebut di atas salah jika mengandung arti bahwa badan dan jiwa itu dua, seperti randu alas dan kesimbukan, dan bahwa hubungannya itu hanya seperti yang “merambat” dan yang “dirambati”, tetapi

mengandung kebenaran, sekedar menunjuk tergantungnya badan dari jiwa. Badan itu tidak berdiri sendiri, tidak berada dengan berdiri sendiri, badan itu berada dalam dirinya sang Jiwa (Driyarkara, 2006: 109).

Atas dasar argumentasi tersebut maka badan bukanlah suatu substansi, bukanlah sesuatu *thing* dalam arti sesuatu yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat disebut sebagai substansi sama sekali. Disebut sebagai sesuatu *thing* bisa, namun dalam arti yang umum yakni bahwa semua itu sesuatu meskipun berdiri sendiri atapun tidak. Maka, apabila dinyatakan bahwa badan itu sebagai “baju”, maka hal ini berarti memberikan predikat substansi, badan sudah dipersubstansikan. Keliru juga apabila dinyatakan badan itu sebagai wadah, dan jiwa itu isinya. Sebab apabila demikian maka badan dan jiwa itu masing-masing ada secara sendiri-sendiri.

### **Badan dan Dinamika Manusia**

Manusia adalah makhluk yang berbadan “*jism*”. Badan bersatu dengan realitas sekitarnya. Seluruh manusia adaah rohani namun seluruh manusia juga adalah jasmani. Inilah yang disebut kesatuan rohani jasmani. Rohan jasmani bukanlah dua bagian karena keduanya menyeluruh. Pandangan jiwa badan bisa salah karena memandang dua prinsip secara tersendiri. Dalam realitas, yang ada bukanlah salah satunya, rohani atau badan saja. Dalam realitas, yang ada bukan badan, tetapi manusia, dan ini mempunyai aspek rohan dan jasmani. Badan hanyalah aspek jasmani manusia, sehingga tidak boleh disendirikan, dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Akan tetapi, manusia dapat memisahkan dirinya dari ssesuatu objek dan dapat menyembunyikan dirinya sebagai sesuatu yang bukan objek. Karena, sejatinya manusia memiliki kebebasan yang terbatas (Fuad Noorzeha, Dita Kafaabillah 2022).

Oleh karenanya harus dipahami terlebih dahulu, mengkaji pendapat mengenai badan manusia tidak boleh jatuh pada pemahaman yang salah, antara lain; *Pertama*, Pandangan idealis tentang badan. Badan hanyalah pancaran dari roh. Roh adalah listrik, badan adalah cahayanya. Badan dan roh tidak pernah bertentangan, tetapi badan seolah-olah tidak ada, yang ada hanya roh. *Kedua*, pandangan materialistis yang ada hanyalah badan. Manusia hanya dipandang dalam aspek materinya saja. *Ketiga*, pandangan dualistis. Badan sebagai kebalikan roh. Roh dan badan adalah pertentangan.

Badan dalam pandangan Driyarkara yang lebih komprehensif tidak lagi dipahami secara terpisah dengan aspek rohaninya. Badan adalah bentuk kongkret dari kejasmanian manusia, atau ada manusia sepanjang ada secara kejasmaniannya. Artinya, yang ada adalah bukan badan melainkan yang ada adalah “aku ini” dan badan adalah “aku” dalam bentukku yang jasmani. Badan adalah aku sendiri dalam kedudukan manusia sebagai makhluk jasmani. Dengan demikian, Badan adalah wujud manusia sebagai makhluk jasmani (Driyarkara, 2006: 184). Badan merupakan struktur hidup atau biologis, yang berproses menurut hukum-hukum biologis, ditentukan oleh hukum-hukumnya. Manusia juga dibentuk oleh lingkungan di mana manusia hidup, yang kemudian membuka kemungkinan perbedaan satu sama lain dalam aspek kongkret kejasmaniannya, misalnya warna kulit ataupun bentuk tubuh. Namun demikian, kerohanian manusia selalu berusaha mengalahkan aspek-aspek yang bersifat kejasmanian. Manusia merupakan satu kesatuan antara aspek rohani dan aspek jasmani, namun kesatuannya tidak sempurna, selalu ada konflik antara rohani dan jasmani (Driyarkara, 2006: 187).

Kemenangan rohani selalu ditandai oleh kemenangannya terhadap aspek jasmani yang biasanya sudah ditentukan dalam hukum-hukum biologis, khususnya hukum hereditas yang memungkinkan manusia menjadi atau mewujudkan menurut bentuknya saat ini. Karena, pewarisan gen yang membuta manusia satu bisa berbeda dengan lainnya. Di balik wujud konkretnya manusia yang berbeda-beda, seperti misalnya gemuk kurus, besar kecil, putih hitam, dan lainnya dapat tetap mewakili sisi jasmaninya. Namun, secara kerohanian manusia dengan semua perbedaan jasmaninya tersebut kerohanian manusia tetap bisa berkembang dan berubah.

Sehingga, melalui aspek jasmaninya manusia dapat melaksanakan kemanusiaannya. Hidup dalam ukuran badani adalah untuk memanusiaikan atau menjadi manusia, dan dengan kata lain dengan membadan maka berarti itu memanusia (Driyakara, 2006: 187). Meskipun demikian, bahwa badan atau tubuh mempunyai otonomi sendiri. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang berjalan sendiri sekalipun seluruh hidup badan tersebut dari jiwa asalnya. Badan atau tubuh hanya hidup atas kehendak jiwa. Namun, materia tidak menjadi rohani, tidak menjadi jiwa, hanya menjadi badan yang tetap berproses dengan ditentukan oleh hukum-hukum materia atau biologis tersebut. Dengan demikian, pemisahan keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut; *pertama*, sebagian badan manusia bisa diatur oleh manusia. Kedua, untuk sebagai tidak sebab sudah berjalan dengan sendirinya menurut siklus biologis dan fisiologis.

Driyakara (2006: 189) selanjutnya juga menyatakan bahwa dalam aspek fisiologis, manusia mempunyai sisi kelemahan namun juga sisi keunggulan. Artinya, manusia sebagai bangunan jasmani merupakan struktur yang sempurna, yaitu sebagai kesatuan yang bekerja dalam hukum-hukum yang rumit. Lebih jelasnya, aspek kejasmanian merupakan aktifitas tertinggi manusia sehingga tidak mungkin tanpa fungsi jasmani. Kejasmanian manusia tidaklah sama dengan kejasmanian pada hewan atau binatang. Hal ini karena kejasmanian manusia itu jasmani yang dirohanikan, atau dengan kata lain roh yang mempengaruhi jasmani sehingga dianggap menjasmani (Driyakara, 2006: 190).

#### **Hakikat Manusia Menurut Driyakara**

Manusia adalah kesatuan, sebagai satu substansi maupun sebagai keseluruhan. Keseluruhan itu tampak dalam kesadaran manusia. Hal ini karena manusia meskipun sadar akan badannya, namun dirinya tidak dapat membedakan badan dan jiwa. Manusia hanya mengakui ke-aku-an saja. Memang manusia sadar akan badannya, tetapi badannya tersebut tidak dipandang secara tersendiri. Badan dipahami dalam totalitas, dalam keseluruhan sang Aku. Hal atau pengertian tersebut merupakan kebenaran yang diakui secara umum. Saat menyatakan diri sebagai badan (berkonotasi material), yang dimaksud tentunya adalah seluruh Aku. Manusia mengalami dirinya sendiri sebagai jasmani dan dengan dan dalam itu mengalami diri sendiri sebagai Roh. Roh diidentifikasi dengan badan. Ketika seseorang badannya sakit, maka badan dialami sebagai identik dengan Aku. Karena yang bisa menyatakan Aku itu adalah jiwa rohani, jadi badan dialami sebagai identik dengan jiwa rohani.

Meskipun demikian dalam suatu kondisi, selain prinsip identik tersebut, didapati atau dialami juga perbedaan, bahkan perlawanan. Manusia sadar akan perlawanan badannya. Badan bisa mengalami banyak hal yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, harus diakui bahwa badan dan jiwa identik, tetapi juga tidak identik. Hal ini bisa terwakili dalam sebuah kalimat: Aku ini badan, namun juga bisa dinyatakan: aku mempunyai badan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa badan adalah sudut luar dari diri manusia. Badan adalah “aspek keluar” manusia. Badan adalah *the externity, visibility dari invisibility* manusia. Manusia sebagai keseluruhan dikatakan : *wahya-jatmika* dan *jatmika-wahya*. Badan adalah *wahya-dari-jatmika-wahya*. *Jatmika-wahya* sebagai wahya: itulah badan manusia, atau lebih baik manusia sebagai roh-badani (Driyakara, 2006: 111).

Bagaimana memberikan penjelasan tentang manusia sebagai kesatuan? Contoh sederhana dari hal ini adalah tentang perkataan manusia yaitu perkataan yang sedang diucapkan. Percakapan manusia adalah kesatuan antara pikiran dan suara berupa kesatuan. Pikiran tidak berada di luar atau di dalam suara. Suara pun tidak di luar atau di dalam pikiran. Suara adalah hal material, sedangkan pikiran adalah hal rohani. Melalui contoh ini maka rohani dan material atau jasmani tepat menjadi satu. Pikiran dan suara adalah satu. Yang didengarkan dari percakapan adalah pikiran dan suara, atau pikiran yang menjelma. Pikiran dan rohani (rohani dan jasmani) adalah identik, seperti rohani dan jasmani manusia. Akan tetapi juga tidak identik, sebab pikiran pada hakikatnya tidak tergantung dari suara, demikian juga jiwa kita, dimana suara bisa hilang namun pikiran tetap.

Driyarkara selanjutnya sampai kepada kesimpulan awal bahwa kesatuan kodrat manusia adalah sebagai makhluk rohani-jasmani dan jasmani-rohani. Manusia pada hakikatnya mengatasi materia. Manusia adalah rohani jasmani. Dalam setiap tindakannya sebagai representasi kehidupan jasmaniah manusia yang menentukan dengan kesadaran, pemilihan, maupun kemerdekaan sebagai representasi kehidupan rohaniannya. Atas hal tersebut maka manusia berdasarkan kerohaniannya, manusia adalah Pribadi atau Persona. Hubungan antar manusia atau sesama manusia yang dialami dirumuskan dengan Engkau-Aku, sedangkan hubungan antara manusia dengan hewan dan lainnya tidak dikatakan dalam rumusan Engkau-Aku. Hubungan Engkau-Aku inilah yang akan digunakan untuk mengkaji mengenai Persona.

Menurut Max Scheler, yang esensia dalam Persona adalah bahwa Persona itu tidak pernah menjadi objek. Persona adalah subjek yang cinta dan harus disambut dengan cinta. Sedangkan Sartre memungkiri adanya Persona. Namun Persona tidak dapat dipungkiri. Pandangan Sartre yang mengatakan bahwa cinta itu tidak mungkin sebab dalam cinta, setiap yang mencintai hanya mencari diri sendiri. Yang ada hanyalah egoisme, oleh sebab itu hidup bersama itu selamanya merupakan konflik atau pertarungan. Berbeda dengan pandangan esensial dari filsuf-filsuf Barat semisal Martin Buber, ataupun Gabriel Marcel dapat diambil titik penting bahwa yang esensial adalah bahwa manusia sebagai Persona tidak boleh dianggap berdiri sendiri, terpisah dari lainnya, berada dalam isolasi. Persona adalah esensial dalam dan dengan hidup bersama.

Persona tidak menjadi objek, dan Persona juga tidak akan mengibjukkan Persona lainnya. Dalam interkouiikasi ini hubungannya bukan subjek dengan objek, akan tetapi Subjek dengan Subjek. Subjek yang memberi: lebih banyak dan lebih sempurna memberi, lebih tetap dan tegak juga Subjek tersebut. Subjek yang menerima: semakain banya kemnerima, makin kuatlah Subjek itu. Persona yang sempurna adalah Persona yang berada dalam interkomunikasi dengan Persona lain sehingga merupakan kesatuan, keintiman yang tak terhingga. Manusia sebagai Persona tidaklah sempurna. Selalu berada dalam perjalanan untuk menjadi Persona yang sempurna, untuk berkomunikasi yang lebih sempurna. Manusia tidak akan menjadi Persona yang sempurna dan tidak akan bisa memberikan dirinya sendiri kepada sesama, jika tidak pertama-tama memberikan sendiri dalam komunikasi yang sedalam-dalamnya kepada sumber utama kepersonaan, yaitu Tuhan sendiri (Sukmono 2013).

Selanjutnya adalah bagaimana memahami persona dan apakah sebetulnya persona? Manusia adalah subjek yang mampu mengaasi ikatan atau hubungan, sehingga manusia bersubsistensi, sungguh-sungguh berdiri sendiri sebagai kediri-sendirian sebagai Pribadi. Manusia mampu mengkreasikan semua perbuatannya (Driyarkara, 2006: 123). Karakteristik manusia adalah kemampuannya mengatasi ikatan dan hubungan. Manusia tidak ditentukan oleh alam, melainkan justru manusia sendirilah yang menentukan. Manusia dengan cara yang sponta mengerti dirinya sendiri dan manusia lain sebagai Persona dan barang-barang *infrahuman* sebagai bukan Persona. Dalam perbuatan dan kesadarannya manusia mengeti bahwa dirinya bebas, idak ditentukan ,dan justru yang menentukan. Manusia menurut kodratnya otonom dan berdaulat. Berdiri sendiri, merupakan kediri-sendirian, dan inilah yang disebut dngan persona atau pribadi. Persona adalah sesuatu yang beidri sendiri atau merupakan kediri-sendirian dalam kodrat rohani. Pada pendapat lain bahwa Pribadi atau Persona adalah sifat khas yang melekat pada manusia. Pribadi adalah subjektivitas yang berdiri sendiri, dia bukan unsur, bukan bagian, bukan sesuatu yang adanya melekat pada subjek lain. Dia meng-ada dan berdiri sendiri, dia menentukan diri sendiri dan merupakan prinsip aktivitas dari dalam yang berotonom (Adisusila, 1974: 96).

Dalam pemahaman lain yang lebih komprehensif, manusia sebagai pribadi (subjek otonom), berarti memiliki kepribadian yang mengatasi atau mentransendir dunia luar, alam sekitar (Sudarminta, 1974: 102). Alex Paat (1991: 8) memberikan penjelasan yang sangat baik terkait dengan substansi manusia sebagai pribadi dan subjek otonom yang mampu memahami diri dan lingkungan dunianya sebagai berikut:

“Selanjutnya lebih jauh, manusia sebagai pribadi tidak mungkin dijadikan sebuah objek. Manusia otonom dan memiliki sifat khas sehingga tidak dapat diulangi dan tidak pernah ada duanya di dunia ini. Pribadi yang ada dalam diri manusia didefinisikan sebagai substansi, individual yang bersifat rasional, yang mampu menyadari dunia luarnya merupakan objek, yang dijadikan alat untuk memperkembangkan diri sehingga makin sempurna. Memahami dasar ontologis tentang individualitas manusia akan menjadi pintu masuk untuk memahami hakikat manusia secara utuh (Paat,1991:8)”.

Berdasarkan hal di atas, oleh karenanya juga harus memberikan pengandaian tentang perbedaan antara istilah individu dengan pribadi atau person. Artinya, pembedaan antara individualitas dan personalitas manusia. Namun demikian, sebetulnya keduanya merupakan sebuah totalitas saat berbicara mengenai manusia. Penjelasan makna individu ini dapat dilacak sekurang-kurangnya dari pendapat Anton Bakker (2000) dan Sneijder (2004), yang mampu memberikan gambaran secara utuh tentang individu, sebagai berikut ini;

“Individu” berasal dari kata Latin *dividere* (membagikan); dan lazimnya dirumuskan sebagai : “*indivisum in se, et divisum a quolibet alio*” (tak terbagi di dalam diri sendiri, dan terpisah dari segala lain”) Istilah ini menunjukkan keseluruhan, totalitas, dan subsistensi manusia (Bakker,2000: 123)”.

“Manusia dapat disebut sebagai individu saat manusia mempunyai identitas dengan diri (“*indivisum in se*” artinya tak bagi dalam diri sendiri) sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari segala individu lain (“*dividum a quolibet alio*” yang artinya terpisah dari segala yang lain). Dalam tradisi Aristotelian, dipakai kata “*substantia*” (berdiri pada kaki sendiri) yang bertentangan dengan kata “*aksidens*” (berada di dalam suatu suatu subjek). Tiap substansi mempunyai individualitas dan keunikan yang khas. Kekhasan manusia adalah bahwa manusia memiliki keunikan sebagai individu dan keunikan sebagai pribadi atau person. Manusia disebut sebagai “*individu*” oleh kebanyakan filsuf yang berorientasi dan berpaham materialistis. Manusia disebut sebagai “*person*” oleh kebanyakan filsuf yang berorientasi dan berpaham spiritualistis (Snijders, 2004: 83-85)”.

Bakker juga memberikan pemahaman mengenai kedekatan penyebutan istilah individu yang terkait dengan paham materialisme, sehingga Bakker dapat memberikan pengayaan baik secara historis maupun kedekatan makna fungsional dari kata individu ini.

“Individualisme berakar pada materialisme. Manusia dipandang sebagai “*individu*”, yaitu salah satu diantara banyak. Individualisme menyamakan keunikan manusia dengan aspek material. Adanya individu dipertahankan dan diperkembangkan oleh manusia dengan melawankan diri kepada yang-lain, dan dengan memberikan prioritas kepada individu itu sendiri (Bakker, 2001:125)”.

Untuk sekedar membandingkan pendapat Driyarakara, perlu juga disampaikan pelacakan atas makna individualitas dan personalitas juga dilakukan oleh Bakker dengan memberikan pembedaan sekaligus perbandingan kesamaan dari pendapat Boethius dan Thomas Aquinas, sebagai berikut ini:

“Individualitas dan personalitas adalah dwi aspek yang ada dalam diri manusia. Boethius menyatakan , “*persona est nature rationalis individu substantia*” (person ialah substansi individual di dalam rangka hakikat yang berkesadaran. Thomas Aquinas juga memberikan pendapat yang memiliki kesamaan, yaitu “*persona est distinctum subsistens in natura intellectuali*” (Bakker, 2000:125)”.

Lebih lanjut Sneijder (2004) memberikan penjelasan mengenai kata individu dan person yang dalam pendapat awam biasanya keduanya dipersamakan arti dan maknanya. Sneijder menekankan pada unitas dari keduanya sebagai dua hal yang berbeda dalam berada dalam norma kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

“Individu dan person tidak sama, namun tetap merupakan suatu kesatuan. Individualitas memberikan wajah pada kepribadian. Karena itu, apabila seseorang semakin mempribadi, maka kepribadian orang itu juga semakin tampak dalam perwujudan perilaku kejasmaniannya. Di dalam kesatuan itu terdapat dualitas, dan dalam dualitas hadir suatu kesatuan (Snijder, 2004: 92)”.

Persoalan mengenai pemaknaan individu dan person secara komprehensif juga secara terang dan jelas diberikan oleh Bakker (2000) sebagai berikut ini:

“Lebih jauh Aristotelo-tomisme berpendapat bahwa personalitas manusia berdasarkan kerohaniannya atau jiwanya sedangkan individualitasnya berakar pada “materi” bersama dengan “kuantitas”. Akan tetapi seluruh manusia, termasuk jiwanya, juga menjadi individual. Kedua aspek dinilai sesuai dengan pendapat tradisional. “Person” yang bersifat spiritual itu “*per se*” sempurna, mempunyai otonomi, memiliki nilai instrinsik yang mutlak, bersifat universal, dan berkebebasan penuh. Menunjukkan yang membedakan manusia dari semua yang bukan-manusiawi. “Individu”, walaupun tidak mengingkari atau meniadakan totalitas, subsistensi dan “*incommunicability*” manusia, tetap membatasi “person” menjadi satu di tengah-tengah banyak yang sejenis. Sebagai “individu” maka manusia dikuasai oleh masyarakat dan jenis-manusia. Adanya “individu” menunjukkan yang serupa pada manusia dan bukan manusia. “Person” menambahkan sesuatu kepada “individu”, terutama kesadaran. Adanya individu sedapat mungkin harus diatasi dengan memperkembangkan diri sebagai person (Bakker, 2000:125-126)”.

Berangkat dari pemahaman tentang individu dan person tersebut maka dapat diberikan sebuah catatan bahwa individu dan person merupakan dua sisi yang saling mengadakan. Keduanya merupakan dua dimensi dalam diri manusia yang saling memungkinkan untuk mewujudkan eksistensi manusia, khususnya keunikan diri pribadi manusia dibandingkan dengan yang-lain.

Keunikan adalah faktisitas yang dimiliki oleh manusia. Keunikan sebagai faktisitas manusia inilah nanti yang kemudian menjadikannya sebagai keunikan material atau keunikan manusia menurut perwujudannya. Keunikan menurut perwujudannya ini disebut sebagai keunikan material, dan diungkapkan dengan istilah individualitas.

“Manusia mengalami keunikan dirinya sebagai suatu dimensionalitas atau kompleksitas (yang disatukan dan difokuskan). Manusia dalam keunikannya memiliki suatu kehidupan pribadi sebagai ekspresi tertentu yang khas, yang meliputi segala bidang manusiawi. Melalui perwujudan tersebut maka individu manusia dapat dibedakan dalam banyak unsur di dalamnya. Unsur tersebut dapat berupa nama, warna, tempat kediaman, negara, kebangsaan, ekspresi-ekspresi fisiologis, maupun juga biologis. Semua hal tersebut unik dan tak terulang. Setiap unsur keunikan dalam individu menambahkan detail-detail penggambaran keunikan yang kompleks. Semua perwujudan unsur tersebut saling melengkapi dan meresapi dan saling mewarnai. Dalam fragmen-fragmen tersebut itulah muncul lebih jernih keistimewaan dan keunikan individual manusia sehingga tersusun “*gestalt*” atau “*signalement*” pribadi yang mengandung seluruh kekhususannya (Bakker, 2000:126)”.

### **Membangun Demokrasi Berdasarkan Konsep Driyakara**

Manusia adalah pribadi roh (*person*) sebagai intinya, yang mencerminkan maha-kepribadian Tuhan dan manusia harus berkembang (Sukmono 2013). Syarat bagi manusia bisa memperkembangkan diri sebagai *person* adalah bahwa ia juga harus memperkembangkan kehidupan materinya, kehidupan alam dan kebudayaannya. Dalam pandangan yang demikian Driyakara melihat bahwa manusia dengan tuntutan dirinya sebagai person adalah menghargai eksistensi person-person yang lain dalam *frame* keadilan bagi sesama.

Melalui pola hubungan antar person inilah prinsip keadilan dan kerjasama dibangun. Melalui pola kerja sama ini pula budaya insitusi dapat dibangun. Insitusi yang memungkinkan semua orang mendapatkan apa yang dibutuhkan, penghargaan atas sesama, dan juga untuk tujuan yang lebih besar bagi manusia itu sendiri. Atas dorongan pola hubungan antar person yang demikian ini pula maka setiap individu tergerak dan sadar untuk saling menciptakan kemakmuran bersama sedapat-dapatnya dalam semua kerja sama.

Pola hubungan yang saling memperkembangkan di antara person-person ini pula pemaknaan manusia fundamental juga terproyeksi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Driyakara menyebut sebagai kehidupan sosial yang bermuara pada demokrasi. Driyakara secara khusus juga menyebut demokrasi yang tercermin dalam demokrasi Pancasila adalah demokrasi keluarga sebagaimana yang Driyakara kemukakan:

“...Pancasila itu merupakan kesatuan, yang tak bisa dipisah-pisahkan. Berdasarkan pikiran ini demokrasi kita adalah Demokrasi Pancasila. Pada hemat kami Demokrasi tentu berdasarkan pengakuan bahwa manusia itu pribadi atau person. Tentu saja kita boleh mengingat bahwa dalam alam kita Demokrasi lebih

bersifat keluarga sehingga Demokrasi kita mungkin juga disebut Demokrasi kekeluargaan. Tetapi, akhirnya dasar ini (kekeluargaan) juga berdasarkan pengakuan manusia sebagai person. Justru itulah sebabnya, masyarakat kita anggap sebagai keluarga, dan manusia sesama kita anggap saudara atau sama-sama warga keluarga” (Driyarkara: 2006:947).

Pandangan Driyarkara tersebut menunjukkan konsep manusia Pancasila yang fundamental juga tercermin dalam pandangannya tentang manusia demokratik. Manusia demokratik adalah manusia yang melihat dirinya sendiri bersama-sama dengan sesamanya. Lebih detil lagi istilah sesama merujuk pada sesama sebagai anggota suatu keluarga.

Driyarakara juga berpandangan bahwa semangat dan rasa kesatuan ini membuat manusia individual seolah-olah tenggelam dalam kesatuan. Pikiran sendiri tidak ada, pendapat sendiri tidak ada; pola-pola perbuatan adalah umum, dan orang tidak berani bertindak berlainan dari apa yang dituntut pola itu. Manusia tidak terutama bergerak dan bertindak serta hidup atas dasar rasionya sendiri, melainkan bergerak menurut adat.

Atas dasar hal tersebut maka manusia demokratik adalah manusia yang bertindak berdasarkan norma-norma adat yang melingkupinya dan sejauh mungkin mengedepankan kompromi-kompromi yang saling menguntungkan untuk kebaikan bersama melalui jalan musyawarah, sebagai corak yang pertama. Driyarkara menyebut corak kedua manusia demokratik adalah corak gotong royong. Manusia yang mengandalkan kesatuan kerja. Manusia demokratik dengan corak ini adalah manusia yang mampu melihat dirinya bersama-sama dalam kesatuan kerja (Driyarkara:2006:950). Melalui kesatuan kerja inilah kebaikan bersama dapat diwujudkan. Lebih jauh Driyarkara melihat bahwa manusia demokratik sebagai salah satu ciri manusia Pancasila itu mencakup keseluruhan. Manusia saling bekerja sama secara manusiawi yang saling menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

“ Keseluruhan itu dilihat dan dialami sebagai team kerja. Maka, dalam cara-caranya memunculkan bermacam lembaga, dalam cara-cara kerja: dia bekerja secara manusia, artinya dengan mengakui dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sebab itu, hormat adalah salah satu dari unsur-unsur yang di adakan. Tetapi-dan ini justru untuk kepentingan sesama- dia juga tidak boleh segan-segan berselisih pendapat. Dia harus berembug secara halus, tetapi cara halus itu tidak boleh menyembunyikan perbedaan pendapat, tidak boleh menghalangi serangan, dan sebagainya. Sebagai orang dewasa, dia harus bisa menerima kalau pendapatnya tidak diterima. Kritik harus dipandang sebagai hal yang biasa. Harus diterima dan dijawab dengan senang hati” (Driyarkara, 2006:951).

Manusia fundamental sebagai intisari dari manusia pancasila menurut Driyarkara adalah juga manusia yang tidak bisa lepas dari konteks identitasnya. Identitas yang membuatnya berbeda dengan manusia lainnya karena identitas lah yang telah membentuk dirinya sebagai manusia. Manusia pancasila adalah gambaran lain tentang manusia yang selalu mampu mengerangkan dirinya dalam konteks identitas dan kehidupannya. Terkait dengan konteks identitas ini Driyarkara menekankan pada tuntutan bahwa identitas tidak boleh hanya dilihat secara statis. Identitas harus mampu menjadi ciri khas bagi manusia untuk terlibat secara penuh untuk membangun dan menjaga identitas tersebut dengan cinta. Cinta terhadap kebaikan yang akan membangun identitas komunitasnya.

Manusia fundamental pancasila berikutnya adalah manusia yang mampu melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang dengan rasio dan kemerdekaanya harus menyempurnakan dirinya, bersama-sama dengan sesama manusia dalam masyarakat. Manusia yang harus menjunjung tinggi manusia lain untuk dipantaskan sesuai dengan martabatnya. Oleh karenanya, ciri manusia fundamental yang berperikemanusiaan adalah manusia yang tidak ingin melihat sesamanya menderita, sehingga terpanggil untuk menolong dan memuliakan sesamanya yang tengah menderita.

Driyarkara berpendapat bahwa untuk mencapai hal tersebut maka manusia harus membangun dirinya dengan membangun kebudayaan dalam rangka memantaskan harkat dan martabat kemanusiaanya. Terkait hubungannya dengan sesama maka manusia harus melihat

dirinya sendiri dalam kesatuan dengan sesama dalam masyarakat, yang dipandang secara sama dan tanpa diskriminasi. Negara sebagai salah satu elemen identitas yang menyertainya harus dihadirkan untuk menjamin terbangunnya penghargaan martabat kemanusiaan secara lebih luas. Manusia melihat dirinya sendiri dalam kesatuan dengan sesama dalam masyarakat menjadi titik tekan pandangan Driyarkara.

Manusia dalam pertemuan dengan sesamanya menjadi sadar akan dirinya sendiri dengan cara yang lebih sempurna. Dalam pertemuan antara persona-persona, dalam pergaulan hidup bersama, maka manusia menjadi lebih sadar atas dirinya sendiri sebagai person, bahkan makin membina kepribadiannya sendiri. Dalam komunikasi antar person manusia saling menyempurnakan. Makin banyak persona memberi dari kepribadiannya maka makin kayalah pribadi itu (Driyarkara, 2006: 171). Dalam kerangka yang demikianlah sebenarnya konsep humanisme Driyarkara ini dibangun, yaitu hakikat untuk saling menyempurnakan di antara manusia. Semua ciri dan corak manusia fundamental manusia tersebut pada akhirnya dirangkai dalam satu kesatuan manusia utuh yang tidak pernah lepas dari panggilan keIlahiannya. Manusia merealisasikan kebaikan-kebaikannya terhadap sesama juga merupakan wujud dari citra Tuhan dalam kebaikan.

### SIMPULAN/CONCLUSION

Paham manusia fundamental Driyarkara memberikan alternatif bahwa warganya diberikan kebebasan dalam mewujudkan sistem demokrasi yang baik maka perlu dituangkan penerapan pancasila secara merata. Dengan demikian konsep manusia dalam pandangan Driyarkara dapat dicirikan dalam beberapa corak berikut ini; *Pertama*, perihal kesatuan manusia dalam lingkungan sosialnya yang menonjol. *Kedua*, identitas menjadi konteks eksistensi manusia itu. Hal ini karena identitas adalah titik tolak dalam manusia melihat diri dan sesama serta lingkungan luasnya. *Ketiga*, corak manusia fundamental menurut Driyarkara adalah sisi humanismenya yang menonjol. Sekaligus juga humanisme yang religius yaitu Tuhan sebagai panggilan kodrat kemanusiaan untuk berbuat kebaikan bagi sesamanya. Humanisme pada akhirnya menawarkan kesalehan yang bersifat universal.

Sehingga, Driyarkara dalam pokok-pokok pikirannya tentang manusia juga melihat bahwa dalam diri manusia terdapat ekstrimitas antara individualitas dan sosialitasnya, namun sikap yang harus diambil adalah dengan jalan mengambil posisi tengah di antara ekstrimitas itu dengan tidak menghapuskan person sebagai representasi individualitas dengan masyarakat sebagai wujud dari sosialitas. Kedua-duanya harus diperhitungkan, dengan memadukan keduanya. Pokok ekstrimitas adalah karena memisahkan kedua faktor tersebut. Hal ini dengan istilah hakikat rangkap yang dimiliki manusia yang harus diterima dengan kesadarannya yang penuh. Maka, dengan demokrasi adalah hak masyarakat dapat menentukan sendiri jalannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbagnano, 1967, *Humanisme*” dalam Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. IV, The Macmillan Company & The Press, New York
- Abidin, Zainal., 2009, *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Asa, Agam Ibnu. 2019. “Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara Dan Driyarkara.” *Jurnal Pendidikan Karakter* 9(2):245–58. doi: 10.21831/jpk.v9i2.25361.
- Adisusila, J., 1974, “Manusia yang Bermasyarakat” dalam *Driyarkara*, STF, Jakarta, Tahun III No. 4, 30 September
- Alfian, 1978, *Pemikiran an Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Bakker, Anton, 1992, *Ontologi Atau Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta
- , 2000, *Antropologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bakry, Noor M, 1985, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, BPFH UII, Yogyakarta.
- Berofsky, Bernard, 1971, *Determinism*, Princeton University Press, America
- Bleicher, Joseph., 1980, *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique*, London Routledge and Kegan Paul.
- Budiman, Arif., 1989, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Graedia , Jakarta.
- Saleh, Zainal Abidin. 2008. “Demokrasi Dan Partai Politik.” *Legislasi Indonesia* 5(1):56–80.
- Sukmono, Banin Diar. 2013. “Etika Driyarkara Dan Relevansinya Di Era Postmodern.” *Jurnal Filsafat* 23(1):77–98.
- Darmaputera, Eka, 1988, *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Daroeso, Bambang., dan Suyahmo, 1989, *Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta.
- Dibyasuharda, 1990, *Dimensi Metafisik Dalam Simbol, Ontologi Mengenai Akar Simbol, Disertasi*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta
- Dister., Nico Syukur, 1988, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Drijarkara, 1980, *Driyarkara tentang Negara dan Bangsa*, Kanisius, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1989, *Filsafat Manusia*, cetakan kedelapan, Kanisius, Yogyakarta.
- , 1989, *Percikan Filsafat*, Pembangunan, Jakarta.
- Ewing, AC., 1962, *The Fundamental Questions of Philosophy*, Collier Books, New York
- Fukuyama, Francis, 2002, *The Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*, Penerbit Qalam, Yogyakarta
- Fuad Noorzeha, Dita Kafaabillah, John Abraham Ziswan Suryosumunar. 2022. “Menggugat Kebebasan Individu Dalam Penegakan UU ITE Perspektif Eksistensialisme Jean Paul Sartre.” *Widya Kerta Jurnal Hukum* 5(2):79–99.
- Hadi, Hardono, 1996, *Jatidiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, Kanisius, Yogyakarta
- , 1996, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2010, *Potret Siapakah Aku*, Kanisius, Yogyakarta.

- Hartoko, Dick, 1986, *Kamus Populer Filsafat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hatta, Muhammad, 1960, *Demokrasi Kita*, Pustaka Antara, Djakarta.
- Kaelan, 1999, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta
- , 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2005, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Pardigma, Yogyakarta.
- , 2009, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2012, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta
- Kartohadiprodo, Soediman, 1968, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang dasar 1945*, Binacipta, Bandung.
- Kattsoft., Louis, 2004, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Latif, Yudi., 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Leahy, Louis, 1989, *Manusia Sebuah Misteri, sintesa filosofis tentang makhluk paradoksal*, Gramedia, Jakarta.
- Lee, Jung Young, 1979, *The Theology of Change: A Christian Concept of God in an Eastern Perspective*, Maryknoll: Orbis Books, New York.
- Maharani, Septiana Putri., 2008, *Filsafat Manusia Unsur-Unsur dan Problematikanya*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Madjid, Nurholish, 1991, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung.
- Mulyono, Edi., 2012, *Belajar Hermeneutika*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Yogyakarta
- , 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Yogyakarta
- Paat, Alex., 1991, *Panggilan Manusia Pancasila, Makalah Penyegaran Penataran P-4 UGM*, Yogyakarta, 1 s/d 2 Agustus
- Pasha, Musthafa Kamal, Lasiyo, Fahmi Muqodas, Mudjiyana, 2000, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto., 1989, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pranarka, AWM., 1996, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta
- Pringgodigdo, A.G., Tanpa tahun, *Sekitar Pancasila*, Penerbit SU-5, Malang.
- Ricouer, Paul., 1985, *Hermeneutics and The Human Sciences*, ed. Dan terj John B. Thompson, Cambridge, Cmbridge University Press.
- Runes, Dagobert D., 1942, *Dictionary of Philosophy*, Philosophical Library, New York

- Russell, Bertrand., 1951, *New Hopes For A Changing World*, Goerge Allen & Unwin Ltd, London
- Salam, Burhanudin., 1988, *Filsafat Manusia ( Antropologi Metafisik)*, Bina Aksara, Jakarta
- Setiardi, Gunawan, A., 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Siswanto, Dwi., 2001, *Humanisme Eksistensial Jean Paul Sartre*, Philosophy Press, Yogyakarta
- Smith, Wilfred Cantwell, 1963, *The Faith of Other Men*, New American Library, New York.
- Snijders, Adelbert., 2004, *Antropologi Filsafat, Manusia, Paradoks dan Seruan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekarno, *Lahirnya Pancasila, Pidato 1 Juni, 1945* BPUPKI
- , 1963, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Djilid Pertama , Penerbit Dibawah Bendera Revolusi
- , 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Penyunting Floriberta Aning, Media Pressindo, 2006
- Soros, Goerge., 2002, *Krisis Kapitalisme Global ( Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya)* terjemahan *The Crisis of Global Kapitalism* oleh Dindin Solahudin, Penerbit Qalam, Yogyakarta
- Sudarminta, 1974, “Sebuah Refleksi Atas Manusia Sebagai Pribadi” dalam *Driyarkara*, STF, Jakarta, Tahun III No. 4, 30 September.
- Sumaryono, E., 1999, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta
- Sunoto, 1984, *Filsafat Pancasila I*, Hanindita, Yogyakarta.
- Sunoto, 1984, *Filsafat Pancasila pendekatan melalui Metafisika-Logika-Etika*, Hanindita, Yogyakarta
- Titus, Smith, Nolan., 1983, *Living Issues In Philoshopy, Persoalan-Persoalan Filsafat* alih bahasa Soejono Soemargono , Bulan Bintang, Jakarta
- Tunggul Alam., Wawan, *Kumpulan Pidato (Bung Karno Menggali Pancasila)*, 2001, Penyunting, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Veecer, KJ., 1985, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Gramedia, Jakarta.
- Wahana, Paulus., 1993, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta
- Wild, John., 1984, *Introduction to Realistic Philosophy*, Harper & Bros, New York.
- Jurnal Filsafat “Wisdom” Seri 24, Februari 1996 *Refleksi Metafisik Atas Pancasila* oleh Suhartoyo Harjosatoto, FFI UGM, Yogyakarta
- Jurnal Filsafat “Wisdom” Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2013 *Konsep Muhammad hatt tentang Implemntasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila* oleh Sri Soeprapto, FFI UGM, Yogyakarta.